



RINGKASAN PUBLIKASI

Kertas Posisi Bersama CSO Indonesia tentang *Benchmarking* EUDR

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, yang terdiri dari 45 organisasi termasuk LSM, serikat petani dan buruh perkebunan, organisasi Masyarakat Adat, komunitas lokal, serta perwakilan perempuan dan pemuda, meluncurkan Kertas Posisi Bersama tentang Pemeringkatan (*benchmarking*) EUDR.

Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) merupakan inisiatif penting negara konsumen dalam upaya menekan deforestasi global dan mendorong produksi komoditas yang berkelanjutan. Komoditas yang dicakup dalam peraturan ini adalah kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, daging sapi, dan produk turunannya. Peraturan tersebut mensyaratkan produk - produk yang masuk atau keluar dari Uni Eropa harus: 1) Bebas deforestasi sejak 31 Desember 2020; 2) Diproduksi sesuai peraturan perundang-undangan negara produsen; dan 3) Disertai pernyataan uji tuntas (*due diligence*).

Saat ini Uni Eropa sedang merundingkan penundaan implementasi penuh EUDR selama 12 bulan. Implementasi yang semula direncanakan pada 30 Desember 2024, akan diundur menjadi 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil. Indonesia yang memiliki 5 komoditas terdampak peraturan EUDR yaitu kayu, sawit, kakao, kopi dan karet, telah mulai mengambil langkah-langkah persiapan pemenuhan persyaratan EUDR.

Aturan mengenai *benchmarking* dalam EUDR berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan terutama bagi negara-negara penghasil utama seperti Indonesia. Lanskap komoditas Indonesia yang beragam, mulai dari sektor berisiko tinggi seperti kelapa sawit dan kayu, hingga komoditas berisiko rendah seperti kakao, kopi, dan karet, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terperinci dalam penilaian risiko.

Sistem nasional untuk menjamin komoditas yang diproduksi secara legal dan berkelanjutan seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) untuk kayu dan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk kelapa sawit, mencerminkan komitmen Indonesia dalam peningkatan tata kelola hutan dan lahan serta praktik produksi yang bertanggung jawab, yang seharusnya diakui dan dipertimbangkan dalam penilaian *benchmarking* EUDR.

Sistem *benchmarking* saat ini, yang berpotensi menyamaratakan risiko seluruh komoditas dalam suatu negara dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti diskriminasi terhadap komoditas berisiko rendah serta dampak negatif terhadap petani kecil dan komunitas lokal dan Masyarakat Adat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan terbatasnya

keterlibatan pemangku kepentingan menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan efektivitas sistem ini.

Koalisi Masyarakat Sipil EUDR mengajukan serangkaian rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan sistem *benchmarking* EUDR. Rekomendasi tersebut meliputi penerapan penilaian risiko spesifik komoditas, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, memperbaiki transparansi, mengakui inisiatif keberlanjutan yang sudah ada, serta melakukan penilaian dampak sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Tautan bacaan [Kertas Posisi Bersama CSO Indonesia tentang Benchmarking EUDR](#)